

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan standar hidup pada masa yang akan datang. Investasi atau penanaman modal adalah komponen pembentuk nilai tambah nasional, yang merupakan pembelian barang modal dan pelengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi memainkan peran penting yang tidak hanya berperan pada pertumbuhan jangka panjang tetapi juga pada siklus bisnis jangka pendek karena investasi merupakan unsur GDP yang paling mudah berfluktuasi/berubah (Mankiw, 2006).

Investasi pada hakikatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Urgensi tentang pembentukan modal di daerah mendapat perhatian dan penekanan oleh Zaris (1987) yang menyatakan bahwa investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (*regional capital formation*).

Demikian pula halnya dengan inflasi, tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas (*overheated*). Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran

produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan daya beli uang (*purchasing power of money*). Disamping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan Negara-negara sahabat agar Negara mereka mau melakukan investasi di Indonesia, mengadakan forum-forum dengan para pengusaha agar mereka mau meningkatkan investasi, membuat regulasi-regulasi yang semakin memudahkan proses penanaman investasi di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia adalah mengambil kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif ditandai dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Salah satu tujuan peningkatan pengeluaran pemerintah ini adalah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, tentu anggaran untuk membuat sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan investasi bisa lebih besar. Sarana dan prasarana tadi bisa berupa jalan, rel kereta api, pelabuhan, pembangkit listrik, dll.

Upaya lain yang diciptakan pemerintah dalam menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi salah satunya menerapkan berbagai aturan mengenai investasi, diantaranya adalah undang-undang No. 1 tahun 1967, dan No. 11 tahun

1970, tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6 tahun 1968, dan No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dimaksudkan adanya UU No. 11 tahun 1970 selain membawa dana masuk, juga membawa serta teknologi produksi, manajemen dan akses ke pasar dunia. Kemudian untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif maka pada tahun 1984 dilakukan debirokrasi dan deregulasi.

Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing terhadap sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam/manusia tetapi tidak memiliki faktor produksi modal yang cukup untuk mengelola/mengolah sumber daya tersebut. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara sederhana diartikan sebagai penanaman modal dalam negeri yang dilakukan didalam negeri. PMDN merupakan bagian dari penggunaan kekayaan yang dapat dilakukan langsung oleh pihak pemilik sendiri atau secara tidak langsung, antara lain melakukan pembelian obligasi dalam negeri, saham, deposito dan tabungan dengan jangka waktu minimal 1 tahun (Purba, 2008).

Berdasarkan data dari BPS tahun 2011-2012 secara nasional investasi swasta di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 30% yaitu sebesar Rp. 252.597,50 milyar rupiah pada tahun 2011 menjadi Rp. 329.719,80 milyar pada tahun 2012. Meningkatnya investasi swasta selama periode 2011-2012 kemungkinan disebabkan oleh faktor tingkat suku bunga, inflasi dan pengeluaran pemerintah daerah.

Inflasi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kestabilan perekonomian disuatu negara. Dengan inflasi yang tinggi, perusahaan

menghadapi ketidakpastian dalam hal harga produk dan input. Oleh karena itu, dalam keadaan tersebut perusahaan multinasional akan menghindari atau mengurangi investasi dinegara-negara yang memiliki inflasi yang tinggi.

Tingkat inflasi secara nasional mengalami peningkatan yaitu dari 4,21% pada tahun 2011 meningkat menjadi 4,61% pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 0,40% (BPS: 2011-2012).

Selain tingkat suku bunga dan inflasi, pengeluaran pemerintah juga mengalami peningkatan pada periode yang sama. Berdasarkan data BPS tahun 2011-2012 terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah daerah secara nasional sebesar 66,67%, dari sebesar Rp. 129.639,24 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp. 216.006,59 Milyar pada tahun 2012. Investasi yang meningkat sebesar 30% dari tahun 2011 ke tahun 2012 dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran daerah. Peningkatan pengeluaran pemerintah daerah tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan investasi disuatu daerah seperti pembangunan jalan raya/penghubung dan pembangkit listrik. Sehingga pihak swasta tidak terbebani oleh pengeluaran lain selain investasinya. Yang akhirnya akan mempermudah akses yang akan digunakan untuk kegiatan perekonomian dan investasi swasta didaerah.

Berdasarkan pemaparan tentang investasi swasta, tingkat suku bunga, inflasi dan pengeluaran pemerintah daerah , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana perkembangan investasi swasta, laju inflasi dan pengeluaran pemerintah di Indonesia selama periode tahun 2008 sampai 2012.
- 2) Bagaimana pengaruh laju inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap investasi swasta di Indonesia selama periode tahun 2008 sampai 2012.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis perkembangan investasi swasta, laju inflasi dan pengeluaran pemerintah di Indonesia selama periode tahun 2008 sampai 2012.
- 2) Menganalisis pengaruh laju inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap investasi swasta di Indonesia selama periode tahun 2008 sampai 2012.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan peran pihak swasta dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa perkembangan ekonomi dari daerah dapat

ditingkatkan dengan menggunakan kerjasama dengan pihak swasta sebagai salah satu sumber pendanaan.

2. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh laju inflasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap investasi swasta di Indonesia.
3. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang investasi swasta

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, pokok bahasan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: KERANGKA TEORI**

Berisi tentang landasan teori kemiskinan yang menguraikan konsep dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan teori-teori para ahli serta kajian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembahasan penelitian.

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang jenis penelitian. Data dan sumber data, konsep dan pengukuran variabel, serta model analisis data.

#### **BABA IV: GAMBARAN UMUM**

Menggambarkan profil daerah penelitian secara umum terdiri dari keadaan wilayah, keadaan penduduk, keadaan investasi, keadaan infrastruktur publik, pengeluaran pemerintah dan laju inflasi di 33 provinsi di Indonesia.

#### BAB V: HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi objek penelitian, yaitu investasi swasta, laju inflasi, dan pengeluaran pemerintah serta pengaruhnya terhadap investasi tersebut.

#### BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian.

